

DISPARITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI 35 KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh:
Supadi¹⁾ dan Hary Pudjianto¹⁾

¹⁾ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Human development has been realized in many countries as one of objective goals to achieve national economic welfare. The problems that face on majority states were the disparities of their human development quality. On Central Java study case, with Human Development Index to count human quality development goal, this research found some indicators to reduce the disparity. Indirectly, the quality of the human development should be increased properly by pushed the local economies performance, basic education level facility, low of infrastructure damage, and also public involved on modern economic activity. Also, the difference of city and regency type that proved statistically had important effect on human development performance. Other factors that affected positively to human development quality were labor availability, industrial concentration, and health facility. This research also founded that the advancement of human development quality correlated positively to per capita income and decreasing of poverty.

Keywords: human development quality, central java, poverty

PENDAHULUAN

Di setiap sektor ekonomi, pembangunan sumber daya manusia memiliki peran penting. Dalam pembangunan sektor industri, faktor pembangunan sumber daya manusia terbukti memiliki peran vital. Hal ini nampak dari wilayah-wilayah industri terkemuka cenderung didominasi oleh tingkat infrastruktur yang tinggi dan kecukupan pemenuhan kualitas sumber daya manusia (Bergs, 2001). Demikian pula di wilayah pedesaan, faktor pembangunan sumber daya manusia diperlukan terutama untuk meningkatkan standar hidup dan keberlangsungannya (Bayaner, 2003).

Di berbagai negara, pembangunan sumber daya manusia merupakan kendala dalam pencapaian pembangunan. Pakistan merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan cukup sukses dalam pertumbuhan ekonomi namun gagal dalam pembangunan sumber daya manusianya, terutama dalam sektor kesehatan mendasar, pendidikan dan kesamaan gender. Di negara tersebut juga terdapat masalah distribusi pendapatan dan aset yang lebih dikuasai dalam lingkungan keluarga, klan dan hubungan adat (Ahmad dan Abu Thalib, 2010). Nayak (2009) menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam perekonomian. Menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada ketepatan penggunaan dari sumber daya manusianya.

Pembangunan sumber daya manusia juga dipandang lebih penting daripada pembangunan faktor fisik. Arubayi dan Ikoya (2009) menyatakan bahwa investasi dalam bentuk sumber daya manusia akan berdampak bertambahnya

kemajuan (*appreciate*) sementara investasi dalam bentuk lainnya akan bersifat makin berkurang (*depreciate*). Terhambatnya pembangunan sumber daya manusia juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Pradhan (2011) menjelaskan bahwa variasi regional memungkinkan terjadinya kausalitas antara pembangunan sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, beberapa usulan strategi kebijakan telah diupayakan. Dutt (2010) menekankan bahwa peningkatan level pendidikan, peningkatan peran perempuan dalam masyarakat maupun perbaikan tingkat kesehatan secara bersama-sama akan mendorong peningkatan hasil pembangunan sumber daya manusia.

Berbagai riset telah menunjukkan pentingnya hubungan antara faktor ekonomi maupun non ekonomi yang memberikan kontribusi penting dalam pembangunan SDM suatu negara. Berbagai riset ini diantaranya disampaikan oleh Watson (1987), Coulembe (1997), Rodriguez-Pose dan Vilalta-Bufi (2004), Fan, Shenggen dan Connie Chan-Kang (2005), Zheng dan Chen (2007), Fleisher, Belton, Haizheng Li and Min Qiang Zhao (2007), Wu (2008), Gaur (2010), Florida, Richard, Charlotta P.A. Mellander, and Kevin M. Stolarick (2010), Krimi, Mohammad Sharif, Zulkornain Yusop, Law Siong Jok (2010), Sun (2010) dan Sugino (2010).

Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, masih lemah dalam pemanfaatan sumber daya manusianya. *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2010 melaporkan Indonesia termasuk negara dengan struktur kemampuan sumber daya

manusia yang cukup rendah. Dari 173 negara di dunia, Human Development Index (HDI) Indonesia berada pada rangking 83, dengan nilai HDI sebesar 0,684. Nilai ini lebih rendah daripada HDI Malaysia, Brunei Darussalam atau Singapura. Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia masih relatif tertinggal dalam pembangunan sumber daya manusia (UNDP, 2010).

Disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia memiliki implikasi penting. Hill (2000) menjelaskan wilayah di Indonesia memiliki variasi dalam berbagai indikator seperti pendidikan dan kesehatan. Wilayah dengan pendapatan rendah cenderung tergolong sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, meskipun memiliki sumber daya alam yang besar terutama di sektor pertanian.

Di Jawa Tengah terdapat variasi antara berbagai indikator kesejahteraan masyarakat antar daerah. Wilayah dengan pendapatan per kapita relatif rendah memiliki korelasi negatif dengan tingkat pencapaian pembangunan sumber daya manusianya. Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad (2005) mengenai kaitan antara kemiskinan dengan rendahnya pembangunan sumber daya manusia di negara-negara dunia ke tiga. Dengan demikian dapat diperkirakan daerah-daerah dengan pendapatan per kapita relatif rendah di Propinsi Jawa Tengah tersebut berkaitan pula dengan rendahnya hasil pembangunan sumber daya manusianya. Karena itu, perencanaan pembangunan di daerah-daerah tertinggal dalam pembangunan sumber daya manusianya tidak cukup hanya dengan melihat deskripsi dan sebaran wilayahnya tetapi juga perlu mengidentifikasi kendala-kendala dalam pencapaian pembangunan sumber daya manusia tersebut.

Dari latar belakang tersebut, pembangunan sumber daya manusia di Propinsi Jawa Tengah diperkirakan terjadi disparitas. Hal ini sejalan dengan munculnya disparitas pencapaian kinerja pembangunan ekonomi dalam hal pendapatan per kapita masyarakat. Disparitas ini menjadi cerminan adanya pola pembangunan ekonomi tidak seimbang antar daerah. Dikhawatirkan jika kondisi ini berlanjut akan memunculkan divergensi ekonomi yang berimplikasi pada makin sejahteranya sebagian daerah sementara daerah lain semakin tertinggal. Oleh karena itu, identifikasi lebih lanjut diperlukan untuk mendeteksi bagaimana pola sebaran pembangunan sumber daya manusia tersebut dan kendala-kendala apa saja yang terkait dengan upaya daerah dalam memacu pembangunan sumber daya manusianya.

Terkait dengan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat diversifikasi hasil-hasil pembangunan sumber daya manusia kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah?
2. Apakah faktor-faktor sosial ekonomi (yaitu faktor kependudukan, pendidikan, kesehatan dan faktor ekonomi) memiliki pengaruh positif dan penting terhadap tingkat pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah?

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian yang bersifat *eksplanatory* dan data-data yang diambil berbentuk data sekunder. Data-data dari publikasi badan resmi akan diolah untuk menjelaskan fenomena disparitas pembangunan sumber daya manusia di wilayah penelitian dan memberikan gambaran secara statistik mengenai keterkaitan antara faktor pendorong hasil pembangunan sumber daya manusia dengan pencapaian pembangunan sumber daya manusia.

2. Pengambilan Sampel dan Luas Lingkup

Karena data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder dan meliputi ruang seluruh ruang administratif kabupaten dan kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah, seluruh populasi yang dipergunakan dalam penelitian menjadi sampel penelitian. Jumlah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 35 daerah dan semua daerah diambil datanya untuk setiap variabel yang akan dianalisis.

Pada sisi serial waktu, data-data untuk penunjang analisis ini adalah data 5 tahun terakhir (2005 – 2009) yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, maupun sumber data resmi lainnya. Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini adalah data panel atau penggabungan antara data ruang dengan data serial waktu.

3. Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas pembangunan sumber daya manusia dalam penelitian ini menggunakan ukuran yang mengacu pada pengukuran kualitas sumber daya manusia menurut *The United Nations Development Programme* (UNDP), sebuah badan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus masalah pembangunan negara-negara di dunia. Badan di bawah PBB tersebut menggunakan Human Development Index (HDI) sebagai proksi pengukuran kualitas SDM tersebut. Di Indonesia, Human Development Index oleh Biro Pusat Statistik disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada saat ini pengambil kebijakan ekonomi di hampir semua negara di dunia telah sepakat dengan penggunaan Indeks Pembangunan Manusia versi UNDP sebagai alat

ukur untuk menilai kinerja hasil pembangunan manusia. Meskipun demikian bagi para ekonom, ukuran pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator penentu nilai HDI masih menjadi pertentangan (Fernando, 2006).

HDI mengukur rata-rata kemajuan di suatu negara yang meliputi 3 dimensi pembangunan manusia, yaitu (UNDP, 2010; 252-251));

- a. Usia dan kesehatan, yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
- b. Tingkat pengetahuan, yang diukur dengan tingkat melek huruf dewasa (dengan bobot 2/3) dan dikombinasikan dengan rasio kesempatan menikmati pendidikan dasar dan menengah (dengan bobot 1/3).
- c. Tingkat standar hidup, yang diukur dengan GDP per kapita (dengan ukuran *Purchasing Power Parity* dalam \$US).

Sebelum HDI dikalkulasi, sebuah Indeks diperlukan untuk menghasilkan ketiga dimensi tersebut. Untuk menghitung Indeks-Indeks dimensi ini (Indeks tingkat harapan hidup, pendidikan dan GDP) nilai minimum dan maksimum dipilih untuk setiap indikator tersebut.

Formula untuk setiap dimensi tersebut bernilai antara 0 – 1 dengan rumus:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum}}$$

4. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Analisis regresi diperlukan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang menentukan tingkat pembangunan sumber daya manusia. Untuk menilai suatu daerah adalah tinggi atau rendah tingkat kemampuan pembangunan sumber daya manusianya, dapat digunakan pendekatan kemampuan sumber daya manusia secara relatif antar daerah. Untuk itu, kualitas pembangunan sumber daya manusia dapat digunakan sebagai variabel tergantung. Semakin tinggi nilai IPM berarti semakin tinggi tingkat pembangunan sumber daya manusia daerah tersebut dan sebaliknya.

Untuk memahami indikator-indikator yang penting bagi perkembangan IPM daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, penelitian ini memasukkan pengujian regresi terhadap sejumlah faktor. Analisis perlu memasukkan data lintas daerah untuk mendeteksi pengaruh mengapa suatu daerah memiliki kualitas pembangunan SDM yang tinggi sementara daerah lain relatif rendah. Daerah-daerah tertentu, seperti semua kota di Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Semarang, Sukoharjo maupun Klaten, tergolong daerah dengan hasil pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Sementara, wilayah Selatan seperti Kebumen, Purworejo dan Banjarnegara relatif

memiliki ukuran pembangunan SDM yang rendah. Hasil regresi ini akan dapat melihat faktor sosial dan ekonomi apa yang akan memberikan dampak positif dan sekaligus penting bagi peningkatan IPM daerah tersebut.

Pada analisis regresi ini, IPM diletakkan sebagai variabel tergantung. Variabel penjelasnya meliputi kelompok variabel untuk indikator sosial dan kelompok variabel indikator ekonomi untuk setiap kabupaten/kota sePropinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Variabel angkatan kerja
- b. Variabel pendidikan
- c. Variabel kesehatan
- d. Variabel kondisi infrastruktur
- e. Variabel kinerja ekonomi daerah
- f. Variabel aktivitas sektor riil
- g. Variabel keterlibatan masyarakat dalam sektor moneter
- h. Variabel boneka (dummy) untuk status daerah (kabupaten/kota) dan pengaruh kondisi daerah sebagai daerah industri atau bukan industri.

Pada penelitian ini, model yang dipergunakan untuk menjelaskan kaitan antara variabel tergantung dengan variabel-variabel tak tergantung yang terkait dengan variasi akan dipilih model ekonometri yang terbaik sesuai dengan kriteria teoritis dan gambaran hasil observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disparitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pendekatan Bank Dunia maupun Badan Pusat Statistik, untuk mendeteksi hasil pembangunan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan nilai Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan manusia (IPM). Nilai pembentuk IPM tersebut adalah 4 faktor yaitu angka harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil. Dalam penelitian ini diasumsikan setiap daerah dapat diklasifikasikan sebagai daerah dengan tingkat disparitas faktor penentu IPM sebagai daerah yang relatif pada posisi rendah, menengah atau tinggi.

Pada besaran angka harapan hidup, Kabupaten Pati merupakan daerah dengan tingkat harapan hidup tertinggi di Jawa Tengah. Rata-rata umur penduduk di kabupaten tersebut hampir mencapai 73 tahun. Sementara, kabupaten Brebes merupakan daerah dengan tingkat harapan hidup terendah dengan rata-rata harapan hidup penduduknya sekitar 67 tahun.

Pada sisi angka melek huruf, disparitas yang tinggi terutama terjadi antara wilayah dengan kriteria kota dengan wilayah kabupaten.

Seluruh wilayah kota tergolong sebagai daerah pada kelompok angka melek huruf yang tinggi. Kota Magelang merupakan daerah dengan tingkat melek huruf tertinggi, sekitar 97,25% penduduknya terbebas dari buta huruf. Sebaliknya, Wonogiri merupakan daerah paling rendah melek hurufnya, sekitar 17,86% penduduknya tergolong buta huruf.

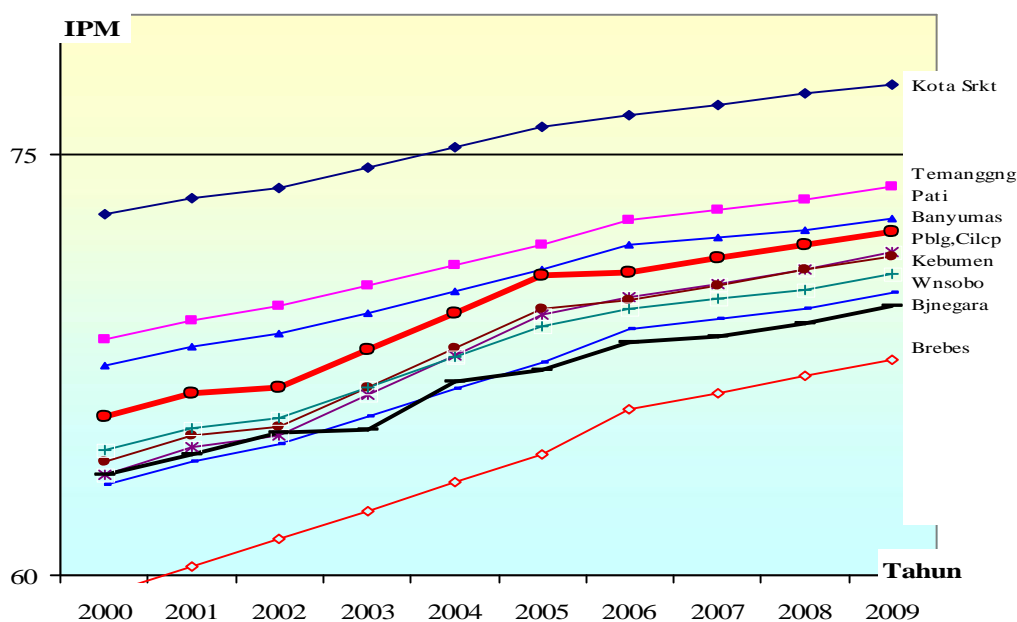
Untuk kemampuan baca tulis, angka melek huruf cenderung berkorelasi positif dengan periode lama belajar penduduk di sekolah. Seluruh wilayah kota merupakan daerah di mana tingkat lama sekolahnya cenderung lebih baik daripada wilayah kabupaten. Kota Surakarta merupakan wilayah dengan lama sekolah paling tinggi. Bersama dengan Kota Magelang, rata-rata penduduk di dua kota tersebut mengenyam pendidikan lebih dari 10 tahun. Sebaliknya, Brebes merupakan daerah dengan lama sekolah paling rendah. Kabupaten Brebes merupakan satu-satunya daerah di Jawa Tengah dengan rata-rata penduduknya mengenyam pendidikan sekolah kurang dari 6 tahun.

Pada kategori rata-rata pengeluaran masyarakat, 5 daerah kota merupakan daerah dengan pengeluaran riil masyarakat dengan kategori relatif tinggi dan 1 daerah kota dengan kategori relatif menengah. Kota Pekalongan merupakan daerah yang tidak tergolong tinggi pengeluaran per kapita masyarakatnya, sekitar Rp636 ribu per bulan selama 2009. Daerah paling rendah tingkat pengeluaran masyarakatnya adalah Sragen dengan pengeluaran riil sekitar Rp627 ribu per bulan.

Kualitas hasil pembangunan sumber daya manusia yang diukur dengan 4 faktor sebelumnya

(harapan hidup, tingkat melek hidup, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil) cenderung bervariasi antar daerah di Propinsi Jawa Tengah. Gambar 1 berikut merupakan sampel dari disparitas tersebut. Kota Surakarta merupakan daerah dengan kulatis SDM tertinggi dengan nilai IPM pada tahun 2009 sebesar 77,49. Daerah ini juga merupakan daerah dengan tingkat IPM tertinggi sejak tahun 2000. Dengan menggunakan kriteria sebagaimana 4 tabel sebelumnya, daerah dengan IPM relatif tinggi pada tahun 2009 adalah Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Temanggung, Semarang, Kota Tegal, Klaten, Sukoharjo, Pati dan Kudus.

Sementara daerah dengan kategori IPM pada skala menengah secara berturut-turut adalah Karanganyar (berselisih nilai 4,94 dengan Kota Surakarta), Jepara, Banyumas, Demak, Purworejo, Magelang, Rembang, Purbalingga, Cilacap, Wonogiri dan Pekalongan. Daerah-daerah lain tergolong nilai IPMnya rendah, yaitu Kebumen, Grobogan, Boyolali, Sragen, Blora, Wonosobo, Tegal, Kendal, Batang, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes. Meskipun Brebes merupakan daerah paling tertinggal dalam ukuran IPM, perkembangan kemajuan pembangunan sumber daya manusia di daerah ini tergolong lebih baik dari daerah lain. Hal ini teridentifikasi dari rata-rata pertumbuhan nilai IPM sepanjang 2001 sampai 2009 sebesar 1,48% per tahun. Nilai ini lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Surakarta yang sebesar 0,68%, Temanggung 0,85%, Pati 0,83% sampai Banjarnegara yang sebesar 1,02% per tahun.



Sumber: BPS Jawa Tengah, berbagai tahun, data diolah (di mana tahun 2000, 2001, 2003, 2004 dan 2007 merupakan hasil estimasi).

Gambar 1. Perkembangan Nilai IPM dengan Sampel 10 Daerah di Jawa Tengah

2. Faktor Pendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia

Karakteristik pembangunan sumber daya manusia secara langsung diukur melalui perubahan kualitas hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, lama pendidikan sekolah dan tingkat pengeluaran riil. Meskipun demikian, berbagai faktor dapat diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan kualitas hidup tersebut secara tidak langsung. Kesempatan kerja maupun kemampuan ekonomi mendorong mampu memberikan dampak pada kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi riil.

Perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan mendapat kemudahan layanan kesehatan. Kondisi infrastruktur mampu mengubah kinerja perekonomian. Demikian pula kemajuan dalam transaksi bisnis modern diperkirakan akan mendorong kemajuan pendidikan masyarakat dan sekaligus tingkat perekonomian. Pada bagian analisis ini, perubahan kualitas pembangunan sumber daya manusia dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihipotesiskan dipengaruhi secara tidak langsung oleh berbagai faktor tersebut.

Hasil simulasi menunjukkan faktor kemampuan ekonomi daerah, fasilitas pendidikan, perbedaan bentuk daerah (kabupaten atau kota), kondisi infrastruktur maupun keterlibatan masyarakat dalam aktivitas keuangan modern mampu memberikan dampak penting pada perubahan kualitas sumber daya manusia. Hasil identifikasi dari berbagai faktor-faktor yang

memberikan pengaruh penting dengan hasil statistik yang konsisten dan tidak bias pada perubahan kualitas SDM tersebut antara lain:

- Kinerja ekonomi daerah yang diukur dengan pangsa ekonomi daerah (Share_EK) menunjukkan kontribusi positif pada perubahan kualitas sumber daya manusia. Daerah yang tergolong semakin kaya akan mendapat peluang positif untuk semakin tinggi kualitas SDMnya.
- Semakin tinggi fasilitas pendidikan dasar suatu daerah (EDU) yang diukur dengan rasio jumlah guru (SD dan SMP) dengan jumlah sekolah (SD dan SMP) akan semakin mendorong tambahan kualitas sumber daya manusia.
- Terdapat pengaruh penting antara daerah dengan bentuk kabupaten dengan daerah berbentuk kota (DKK) dalam perbedaan hasil kualitas SDMnya. Ketiga model simulasi menunjukkan parameter variabel ini positif dan signifikan dengan kesalahan kurang dari 5%. Hasil positif parameter ini mengindikasikan wilayah kota memiliki kualitas SDM yang lebih tinggi daripada wilayah kabupaten.
- Kerusakan infrastruktur (INF), yang dalam penelitian ini diukur dengan kerusakan jalan raya, akan mendorong turunnya kinerja pembangunan SDM.
- Makin tinggi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas transaksi modern (LnMON), yang dalam penelitian ini menggunakan proksi partisipasi masyarakat dalam sektor perbankan dengan ukuran nilai penghimpunan dana di sektor moneter, berpengaruh positif pada hasil kualitas SDM.

Tabel 1. Permodelan Faktor yang Mempengaruhi Nilai IPM

	Model-1			Model-2			Model-3		
	B	t	•	B	t	•	B	t	•
Intercept	64,793	3,083	0,000	53,654	10,187	0,000	65,208	22,847	0,000
TK1				4,075	0,719	0,478	2,738	0,459	0,650
TK2	3,815	5,902	0,403						
Share_EK	20,788	10,643	0,030				21,511	1,974	0,059
EDU	0,394	0,116	0,002	0,309	2,428	0,022	0,379	3,094	0,005
DKK	2,356	0,706	0,002	1,936	2,345	0,027	2,336	3,046	0,005
INF	-0,002	0,001	0,053	-0,002	-1,795	0,084	-0,002	-1,662	0,108
INDBasic	0,243	0,485	0,702				0,220	0,445	0,660
RiIL				0,003	1,420	0,167			
LnMON				0,849	2,330	0,028			
KES				9,659	0,577	0,569	8,040	0,460	0,649
N	35,000			35,000			35,000		
F	13,327			16,385			11,142		
R2	0,685			0,760			0,676		
DW	2,094			2,395			2,141		
No Autocorrelation Ass	1,233<VIF<1,998			1,294<2,928			1,345<VIF<2,494		
Homocedastic Ass.	Yes			Yes			Yes		

Di mana:

TK1 = Rasio antara jumlah penduduk yang bekerja dengan total jumlah penduduk daerah

TK2 = Rasio antara angkatan kerja dengan total jumlah penduduk daerah

Share_EK = Variabel kinerja kemampuan ekonomi daerah dengan proksi pangsa ekonomi daerah (PDRB daerah/PDRB Propinsi)

EDU = Variabel fasilitas pendidikan dengan proksi rasio antara jumlah guru (pendidikan dasar) dengan jumlah sekolah (Pendidikan dasar)

DKK = Variabel dummy kabupaten kota (Kabupaten = 0, kota = 1)

INF = variabel infrastruktur dengan proksi panjang jalan raya yang rusak (km)

INDBasic = Variabel dummy ekonomi basis untuk sektor industri (bukan basis=0, basis=1)

RIIL = Variabel aktivitas sektor riil dengan proksi dengan proksi jumlah perusahaan besar dan menengah

LnMON = Variabel aktivitas moneter masyarakat dengan proksi nilai penghimpunan dana sektor perbankan (Ln Miliar Rupiah)

KES = Variabel pendukung kesehatan dengan proksi rasio antara jumlah dokter dengan jumlah penduduk

Sementara, beberapa faktor yang sebelumnya diperkirakan memberikan pengaruh penting, hasil analisis mengidentifikasi faktor tersebut berpengaruh konsisten dengan penalaran ekonomi tetapi secara statistik tidak signifikan. Faktor tersebut adalah:

- a. Faktor ketenagakerjaan, yang dalam penelitian ini diukur dengan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja dengan total jumlah penduduk (TK1) menunjukkan tidak memiliki pengaruh signifikan pada perubahan kualitas SDM sesuai pada simulasi model 2 dan 3. Deteksi pada simulasi model 1 dengan menggunakan ukuran rasio antara total angkatan kerja dengan jumlah penduduk (TK1) juga tidak menghasilkan parameter yang signifikan. Meskipun demikian, setiap simulasi menunjukkan faktor ketenagakerjaan ini memiliki tanda positif yang berarti adanya indikasi meningkatnya kesempatan kerja akan mendorong kenaikan kualitas sumber daya manusia.
- b. Faktor perkembangan industrialisasi (INDBasic) pada awalnya diperkirakan memberikan pengaruh penting pada kualitas SDM. Makin tinggi konsentrasi manufaktur (yang diukur dengan nilai LQ sektor industri manufaktur > 1) diperkirakan memiliki kualitas SDM yang makin tinggi pula. Hal ini terkait dengan tingginya

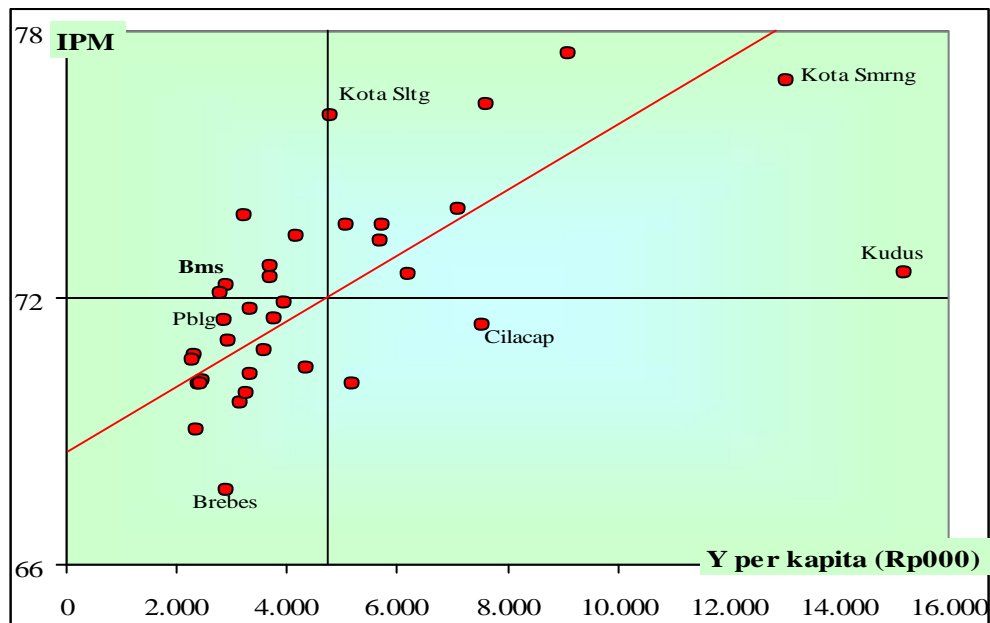
kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dibandingkan sektor primer. Hasil riset menunjukkan kondisi tersebut terbukti tetapi dengan tingkat kesalahan yang tinggi. Parameter dari variabel penjelas ini menunjukkan hasil positif tetapi tingkat signifikansinya rendah (Model 1 dan 3)

- c. Uji coba lain untuk mengukur konsentrasi industri manufaktur adalah dengan menggunakan ukuran jumlah perusahaan besar dan menengah (RIIL). Model 2 juga menunjukkan daerah-daerah dengan jumlah perusahaan besar dan menengah yang relatif lebih banyak terindikasi memberikan pengaruh positif pada perbaikan kualitas SDM daerah tersebut meskipun kurang signifikan.
- d. Hasil riset ini juga menunjukkan pengaruh positif dari fasilitas kesehatan (KES) terhadap kualitas SDM. Parameter variabel penjelas KES menunjukkan tanda positif. Meskipun demikian, dengan proksi tenaga kesehatan (dalam hal ini rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk) hasil statistik menunjukkan besaran nilai statistik yang tidak signifikan.

3. Kaitan Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan Kesejahteraan Ekonomi

Pembangunan sumber daya manusia dapat menjadi indikator pada tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil *plotting* wilayah berdasar pada nilai IPM dan pendapatan per kapita pada tahun data terakhir (2009) disajikan pada Gambar 3. Selain terdapat korelasi positif antara keduanya, gambar 3 juga menunjukkan adanya tingkat disparitas sebaran dalam kualitas SDM maupun pendapatan per kapita. Beberapa daerah tergolong relatif lebih maju adalah daerah dengan pendapatan berkapita tinggi (di atas rata-rata daerah lain) diikuti dengan tingginya tingkat kualitas pembangunan sumber daya manusianya (di atas rata-rata daerah lain). Wilayah dengan kategori ini antara lain: seluruh daerah dengan bentuk kota (Kota Semarang, Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Salatiga) serta Kabupaten Kudus, Karanganyar, Semarang dan Sukoharjo. Cilacap dan Kendal merupakan daerah dengan klasifikasi pendapatannya tinggi tetapi dengan nilai IPM yang relatif rendah.

Wilayah Jepara, Pati, Demak, Temanggung, Klaten dan Banyumas merupakan daerah dengan IPM relatif tinggi dengan pendapatan per kapita yang relatif rendah. Daerah-daerah lain merupakan daerah yang cenderung tertinggal, yang teridentifikasi dari rendahnya nilai IPM disertai rendahnya pendapatan per kapita.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2011, data diolah

Gambar 2. Tipologi daerah berdasar nilai IPM dan Pendapatan Perkapita Daerah di Jawa Tengah (2009)

$$\text{Hubungan 1 : } \hat{\Delta} \bullet \text{IPM} = 0.383 + 0.007 \bullet \text{PenguranganKemiskinan}$$

$$t \quad 8,891 \quad 2,578$$

$$\text{Hubungan 2 : } \hat{\Delta} \bullet \text{PenguranganKemiskinan} = 2.342 + 22.873 \hat{\Delta} \bullet \text{IPM}$$

$$t \quad 0,530 \quad 2,578$$

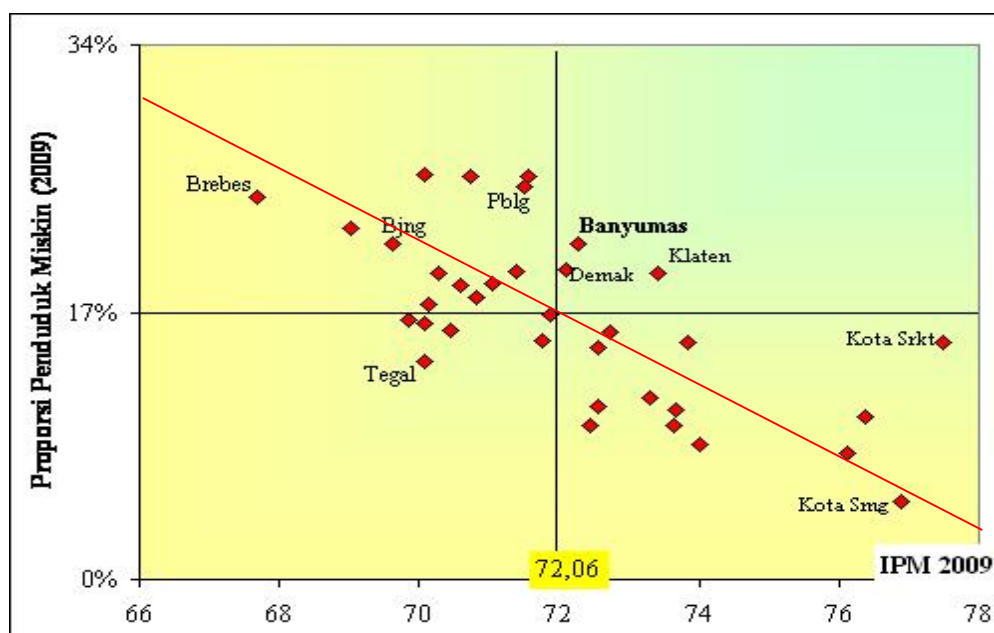
Nilai korelasi dua variabel = 0,410 (signifikan dengan probabilitas kesalahan 0,015)

Riset ini juga mendeteksi hubungan antara tingkat kemiskinan dengan kualitas sumber daya manusia. Karena tidak ada kausalitas yang jelas antara tingkat kemiskinan dengan kualitas SDM, penelitian ini membuat dua identifikasi seberapa besar faktor kemiskinan mampu menurunkan kualitas pembangunan SDM dan seberapa besar faktor tingginya kualitas pembangunan SDM mampu menurunkan tingkat kemiskinan. *Plotting* dari dua variabel tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara jumlah penduduk miskin dengan IPM. Makin tinggi kemiskinan daerah menunjukkan makin rendahnya IPM daerah tersebut, dan sebaliknya.

Berdasar hubungan antara proporsi penduduk miskin dengan nilai IPM sebagaimana gambar 2 tersebut, dapat dibuat perhitungan seberapa besar dampak dari perubahan nilai IPM terhadap tingkat pengurangan kemiskinan. Karena hubungan antara IPM dan kesejahteraan ekonomi masyarakat saling berkaitan, dapat pula dibuat hubungan sebaliknya. Hasil dari kaitan kedua variabel tersebut adalah sebagaimana gambar 3.

Fungsi regresi sederhana tersebut mampu menunjukkan dengan mudah bagaimana dampak kenaikan nilai sumber daya manusia terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan ukuran berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada hubungan regresi 1 dapat dikatakan pada tahun 2009, berkurangnya penduduk miskin sebanyak 1.000 orang mampu meningkatkan IPM daerah sebesar 0,007, atau berkurangnya penduduk miskin sebanyak 100,000 orang akan mampu mendorong kenaikan IPM sebesar 0,7. Demikian pula pada hubungan regresi sebaliknya, pada tahun 2009 kenaikan IPM sebesar 1 indeks IPM akan meningkatkan angka pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.873 orang warga miskin.

Hasil tersebut mengindikasikan ukuran IPM cukup akurat sebagai media untuk mengukur pengurangan angka kemiskinan. Dengan demikian, upaya pengurangan jumlah penduduk miskin akan terkait langsung dengan faktor penentu nilai IPM yaitu: harapan hidup, tingkat melek hidup, lama sekolah, serta besarnya pengeluaran riil penduduk.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2011, data diolah

Gambar 3. Tipologi daerah berdasar nilai IPM dan Proporsi Penduduk Miskin Daerah di Jawa Tengah (2009)

KESIMPULAN

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran penting. Kualitas sumber daya manusia diperlukan terutama untuk meningkatkan standar hidup dan keberlangsungannya. Meskipun demikian, pembangunan sumber daya manusia terkendala sebagai hasil akhir dalam proses pencapaian pembangunan. Secara empiris diketahui terdapat beberapa negara yang relatif sukses dalam pertumbuhan ekonominya namun gagal dalam mendorong pembangunan SDMnya. Selain itu, permasalahan penting yang lain adalah disparitas dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan menggunakan IPM sebagai ukuran kualitas hasil pembangunan sumber daya manusia, hasil penelitian ini menunjukkan adanya disparitas pencapaian pembangunan SDM di Jawa Tengah. Diversifikasi ini terlihat dari tidak meratanya level IPM di daerah-daerah di Jawa Tengah. Diketahui wilayah dengan bentuk perkotaan merupakan daerah dengan nilai IPM yang cenderung lebih baik dari wilayah kabupaten. Hal ini teridentifikasi juga dari struktur penyusun IPM, di mana angka harapan hidup, tingkat melek hidup, rata-rata lama sekolah, serta tingkat pengeluaran riil cenderung lebih tinggi di wilayah kota daripada wilayah kabupaten.

Penelitian ini juga menghasilkan beberapa indikator yang diperkirakan memberikan pengaruh secara tidak langsung pada perkembangan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Kinerja perekonomian daerah, fasilitas pendidikan dasar, rendahnya kerusakan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas transaksi modern memiliki pengaruh positif pada perkembangan kualitas sumber daya manusia. Demikian pula

perbedaan antara wilayah berbentuk kota dengan kabupaten terbukti memberi dampak penting pada kualitas pembangunan SDM daerah. Sementara terdapat beberapa faktor lain yang juga teridentifikasi memiliki pengaruh positif pada level pembangunan SDM meskipun tingkat signifikansinya tergolong rendah. Faktor tersebut antara lain faktor ketersediaan tenaga kerja, tingkat konsentrasi industri dan fasilitas kesehatan. Riset ini juga menambahkan adanya korelasi positif antara kemajuan tingkat pembangunan SDM daerah-daerah di Jawa Tengah dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dengan pendapatan per kapita. Di sisi lain, terdapat hubungan negatif antara kualitas pembangunan SDM tersebut dengan tingkat kemiskinan, ataupun berkorelasi positif dengan tingkat penurunan kemiskinan.

Dari kesimpulan tersebut, beberapa kebijakan yang diperlukan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah penelitian adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah, diperlukan upaya aktif dalam pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu lebih menggerakkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas setiap sektor ekonomi seperti mengurangi lahan menganggur, maupun meningkatkan kualitas peraturan daerah seperti melakukan revisi perda yang anti investasi
2. Faktor pendidikan dasar terbukti kuat mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya yang diperlukan adalah lebih pemerataan ketersediaan tenaga pengajar di

- sekolah terutama penambahan guru sekolah-sekolah di kecamatan-kecamatan terpencil.
3. Kerusakan transportasi menjadi hambatan penting dalam transaksi ekonomi antar wilayah. Diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk selalu melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak.
 4. Disparitas pembangunan antar wilayah kabupaten-kota dapat dikurangi dengan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Aziz, 2005, Kaitan Kemiskinan dengan Rendahnya Pembangunan Sumber Daya Manusia di Negara Dunia Ketiga, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol.7, No.1, Maret 2005
- Ahmad, Muhammad Shakil and Noraini Bt. Abu Talib, 2010, Decentralization initiatives, Economic and Community Development in Pakistan, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol.1, No.4, December, 2010, IACSIT
- Arubayi, E.A. and Peter O. Ikoya, 2009, Variability in Regional Access to Higher Education in Nigeria: Implication for Equity and Even Development among the Niger Delta States, *Journal of Social Science* 20(2): 143-148
- Bergs, Rolf, 2001, EU Regional and Cohesion Policy and Economic Integration of the Accession Countries, Paper to be presented at the *international conference on Regional Transitions: European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement*, convened by the Regional Studies Association at the Faculty of Economics, University of Gdansk, September 2001
- Coulembe, Serge, 1997, Regional Disparities in Canada: Characterization, Trends and Lessons for Economic Policy, *Industry Canada Working Paper Number 18, November 1997*
- Dutt, Mala, 2010, Development and HRD in India, *Proceedings of IDEAS 20th Anniversary Workshop on "the New Trends in Development and Human Resource Development(HRD)-Nurturing Development Experts for the Next Decade"*, Tokyo, March 10, 2010
- Fan, Shenggen and Connie Chan-Kang, 2005, Road Development, Economic Growth, and Poverty Reduction in China, *Research report No. 38: 2005, International Food Policy Research Institute*, Washington, Dc
- Fleisher, Belton, Haizheng Li and Min Qiang Zhao, 2007, Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China, *William Davidson Institute Working Paper Number 857 and presented at at the 5th International Conference on the Chinese Economy, October 20-21, 2005 sponsored by CERDI/DREC, University of the Auvergne, France, and at the ASSA Meetings, January 4-7 2007 in Chicago.*
- Florida, Richard, Charlotta P.A. Mellander, and Kevin M. Stolarick, 2010, Talent, Technology and Tolerance in Canadian Regional Development, *Le Géographe Canadien* 54, no 3 (2010) 277-304, L'Association canadienne des géographes,
- Gaur, Achal Kumar, 2010, Regional Disparities in Economic Growth: A Case Study of Indian States, *Paper Prepared for the 31st General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth*, St. Gallen, Switzerland, August 22-28, 2010
- Gujarati, Damodar, 2003, *Basic Econometrics, Fourth Edition*, International Edition, McGraw-Hill
- Kaldaru, Helje and Eve Parts, 2005, *The Effect of Macro-Level Social Capital on Sustainable Economic Development*, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, Tartu University Press.
- Krimi, Mohammad Sharif, Zulkornain Yusop, Law Siong Jok, 2010, Regional Development Disparities in Malaysia, *Journal of American Science*, 2010;6(3)
- Nayak, Purusottam, 2009, Human Development in North East India, Published in P. Nayak (ed.) *Growth and Human Development in North East India*, Oxford University Press, New Delhi, pp.151-164.
- Pradhan, Rudra P., 2011, An Econometric Approach Between Human Development And Poverty In North Eastern Region Of India, *Information Management And Business Review* Vol. 2, No. 1, Pp. 26-37, Jan 2011
- Rodriquez-Pose, Andres and Montserrat Vilalta-Bufí, 2004, Education, Migration, and job Satisfaction: The Regional Returns of Human Capital in the EU, *BEER (Bruges European Economic Research) Paper no.1*, November 2004

- Sandanshiv, Lalit P., S.R.Chaudhari, B.A.Sandanshiv, Sanjay D. Bhaise, 2008, Regional Disparities In Levels, Of Human Resource Development In Western Satpura Region Of India, *Research Link Issue No.57, Vol. Vii (10), Dec. 2008*
- Sugino, Tomohide, 2010, Evaluating Agricultural Policies of Local Governments in Indonesia after the Implementation of Regional Autonomy by Principal Component Analysis, *Journal of Development and Agricultural Economics Vol. 2(10), pp. 359-367, October, 2010*
- Sun, Shizong, 2006, Technical Efficiency And Its Determinants In Gansu, West China, *Pacific Economic Papers No. 355, 2006*, Australia–Japan Research Centre Crawford School Of Economics And Government Anu College Of Asia & The Pacific
- United Nation, 2001, *Reducing Disparities: Balanced Development Of Urban And Rural Areas And Regions Within The Countries Of Asia And The Pacific*, Economic And Social Commission For Asia And The Pacific, United Nations, New York, 2001
- UNDP, 2010, *Human Development Report 2010; Millenium Development Goals: A Compact Among Nations To End Human Poverty*, The United Nations Development Programme (UNDP), New York.
- Watson, William G., 1987, Demographic Change, Provincial Fiscal Behavior, and Regional Economic Growth, *Canadian Studies in Population, Vol. 14 (2), 1987, pp. 209-222*
- Wu, Yanrui, 2008, Comparing Regional Development in China and India, *Research Paper No. 2008/13 United Nation University: World Institute for Development Economic Research*, Australia
- Zheng, Yongnian And Minjia Chen, 2007, China's Regional Disparity And Its Policy Responses, *China Policy Institute Briefing Series – Issues 25, September 2007*, The University Of Nottingham